

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 14, No. 1, Maret 2023

ISSN: 2087-2054

Tinjauan Literatur Sistematis: Penyelesaian NPF Pada Perbankan Syariah
Agus Munandar, Santy Wijaya, Kemas Dedy Kusdianto, R., Dian Wirdiansyah, Franki Slamet

Model Penilaian *Sharpe* Ratio Untuk Peningkatan Kinerja Reksa Dana
Rini Nur Indah Lestari, Muhammad Fachrudin Arrozi

Analisis Implementasi Dari Akuntansi Penjualan Konsinyasi Berdasarkan PSAK No.72 Pada Toko Azzura Jaya Kosmetik
Tanti Pratiwi, Widya Febryari Anita

Model Kinerja Keuangan untuk Peningkatan Nilai Perusahaan pada Sektor Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia
Tasya Sekar Putri, Muhammad Fachrudin Arrozi

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Reputasi Auditor, Dewan Komisaris, dan Komite Manajemen Risiko terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management
Muhammad Sadat Pulungan, Lourenza Patricia Mandiri Putri

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja Individu Dengan Kepuasan Pengguna Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Koperasi Di Lampung Selatan)
Irwandi, Evi Yuniarti

Strategi Meningkatkan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Peran *Good Governance* dan *E-Government*
Soewito, Haninun, Nurdiawansyah, Khairudin, Luke Suciyati Amna

Aplikasi Digital Kawal Desa: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Andala Rama Putra Barusman, Marzuki, Aminah, Khairudin, Nurdiawansyah, Luke Suciyati Amna, Sindy Astuti, Ahmad Firdaus, Ahmad Paruji, Vina Petricia, Andika Okta Wijaya

Penerapan SAK-EMKM Pada UMKM Kedai Kangen Rasa
Sufyan Edi Hartanto, Syamsu rizal, Indrayenti, Herry Goenawan Soedarsa, Hepiana Patmarina, Farida Efriyanti

Pengungkapan Aset Biologis Perspektif Internal Dan Eksternal
Aminah, Khairudin, Hendri Dunan

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 14, No. 1, Maret 20223

ISSN: 2087-2054

Dewan Pembina

Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A
Prof. Dr. Iskandar Ali Alam S.E., M.M.

Editor in Chief

Aminah, S.E., M.S.Ak.

Managing Editor

Luke Suciyati Amna, S.E., M.S.Ak.

Editor

Khairudin S.E., M.S.Ak.
Nurdiawansyah, S.E., M.S.Ak.

Penyuting Ahli (Mitra Bestari)

Dr. Tina Miniawati, S.E., M.B.A. (Universitas Trisakti)
Dr. Khomsiyah, S.E., M.M. (Universitas Trisakti)
Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.Akt., C.A. (Universitas Lampung)
Sujoko Efferin, Mcom (Hons), MA(Econ), Ph.D. (Universitas Surabaya)

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
SENARAI-Jurnal Akuntansi & Keuangan Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret &
September

Artikel yang dimuat berupa hasil riset Empiris dan telah teoritis konseptual yang kritis
dalam kajian bidang akuntansi, auditing, perpajakan, dan keuangan.

Alamat Redaksi

Gedung F- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
Kampus A Jalan Z.A Pagar Alam No. 26 Labuan Ratu Bandar Lampung 35142
Telp: (0721) 701979, Fax: (0721) 701467, Email: *Prodi.akuntansi@ubl.ac.id*

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 14, No. 1, Maret 2023

ISSN: 2087-2054

Tinjauan Literatur Sistematis: Penyelesaian NPF Pada Perbankan Syariah
Agus Munandar, Santy Wijaya, Kemas Dedy Kusdianto, R., Dian Wirdiansyah, Franki Slamet

Model Penilaian *Sharpe Ratio* Untuk Peningkatan Kinerja Reksa Dana
Rini Nur Indah Lestari, Muhammad Fachrudin Arrozi

Analisis Implementasi Dari Akuntansi Penjualan Konsinyasi Berdasarkan PSAK No.72 Pada Toko Azzura Jaya Kosmetik
Tanti Pratiwi, Widya Febryari Anita

Model Kinerja Keuangan untuk Peningkatan Nilai Perusahaan pada Sektor Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia
Tasya Sekar Putri, Muhammad Fachrudin Arrozi

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Reputasi Auditor, Dewan Komisaris, dan Komite Manajemen Risiko terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management
Muhammad Sadat Pulungan, Lourenza Patricia Mandiri Putri

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja Individu Dengan Kepuasan Pengguna Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Koperasi Di Lampung Selatan)
Irwandi, Evi Yuniarti

Strategi Meningkatkan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Peran *Good Governance* dan *E-Government*
Soewito, Haninun, Nurdiawansyah, Khairudin, Luke Suciyati Amna

Aplikasi Digital Kawal Desa: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Andala Rama Putra Barusman, Marzuki, Aminah, Khairudin, Nurdiawansyah, Luke Suciyati Amna, Sindy Astuti, Ahmad Firdaus, Ahmad Paruji, Vina Petricia, Andika Okta Wijaya

Penerapan SAK-EMKM Pada UMKM Kedai Kangen Rasa
Sufyan Edi Hartanto, Syamsu Rizal, Indrayenti, Herry Goenawan Soedarsa, Hepiana Patmarina, Farida Efriyanti

Pengungkapan Aset Biologis Perspektif Internal Dan Eksternal
Aminah, Khairudin, Hendri Dunan

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 14, No. 1, Maret 2023

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Tinjauan Literatur Sistematis: Penyelesaian NPF Pada Perbankan Syariah Agus Munandar, Santy Wijaya, Kemas Dedy Kusdianto, R., Dian Wirdiansyah, Franki Slamet	1-10
Model Penilaian <i>Sharpe</i> Ratio Untuk Peningkatan Kinerja Reksa Dana Rini Nur Indah Lestari, Muhammad Fachrudin Arrozi	11-30
Analisis Implementasi Dari Akuntansi Penjualan Konsinyasi Berdasarkan PSAK No.72 Pada Toko Azzura Jaya Kosmetik Tanti Pratiwi, Widya Febryari Anita	31-46
Model Kinerja Keuangan untuk Peningkatan Nilai Perusahaan pada Sektor Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tasya Sekar Putri, Muhammad Fachrudin Arrozi	47-69
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Reputasi Auditor, Dewan Komisaris, dan Komite Manajemen Risiko terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management Muhammad Sadat Pulungan, Lourenza Patricia Mandiri Putri	70-82
Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dan Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja Individu Dengan Kepuasan Pengguna Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Koperasi Di Lampung Selatan) Irwandi, Evi Yuniarti	83-100
Strategi Meningkatkan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Peran <i>Good Governance</i> dan <i>E-Government</i> Soewito, Haninun, Nurdiawansyah, Khairudin, Luke Suciyati Amna	101-113
Aplikasi Digital Kawal Desa: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Andala Rama Putra Barusman, Marzuki, Aminah, Khairudin, Nurdiawansyah, Luke Suciyati Amna, Sindy Astuti, Ahmad Firdaus, Ahmad Paruji, Vina Petricia, Andika Okta Wijaya	114-121

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 14, No. 1, Maret 2023

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

	Halaman
Penerapan SAK-EMKM Pada UMKM Kedai Kangen Rasa Sufyan Edi Hartanto, Syamsu Rizal, Indrayenti, Herry Goenawan Soedarsa, Hepiana Patmarina, Farida Efriyanti	122-131
Pengungkapan Aset Biologis Perspektif Internal Dan Eksternal Aminah, Khairudin, Hendri Dunan	132-141

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 14, No. 1, Maret 20223

ISSN: 2087-2054

Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala

I. Kebijakan editorial

JURNAL Akuntansi & Keuangan adalah sebuah berkala yang dipublikasikan oleh Universitas Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menjadi wadah kreatifitas para akademisi, profesional, peneliti, dan mahasiswa di bidang Akuntansi dan Keuangan termasuk juga bidang Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Tata kelola Perusahaan, Perpajakan, Akuntansi Internasional, Akuntansi Managemen, Akuntansi Keperilakuaan, Pasar Modal dan lain sebagainya. Topik yang semakin meluas di bidang kajian riset Akuntansi diakomodir publikasinya di dalam berkala ini.

Paper yang akan dipublikasikan di dalam berkala **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus ditulis di dalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Semua instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian harus dimasukkan di dalam lampiran paper penelitian, paling tidak, penulis bersedia memberikan klarifikasi atas instrumen yang digunakan saat ada permintaan dari peneliti lainnya.

Sekretariat Editor Berkala

Gedung F - Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Kampus A Jalan Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142

Telp.: (0721) 701979, Fax.: (0721) 701467, Email:

II. Petunjuk penulisan

Artikel yang dikirim ke **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus mengikuti petunjuk seperti berikut:

1. Naskah merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan atau sedang dilakukan penilaian pada berkala lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1 spasi, sepanjang 20-30 halaman kertas A4 dengan tipe huruf Times New Roman.. Naskah dikirim atau diserahkan ke sekretariat **JURNAL** Akuntansi & Keuangan rangkap satu disertai disket berikut dengan biodata penulis dan alamat lengkap (kantor dan rumah) pada lembaran yang terpisah dari halaman pertama artikel.
2. Judul naskah dapat ditulis dengan menggambarkan isi pokok tulisan, dan atau ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik.
3. Nama Penulis disertai catatan kaki tentang profesi dan lembaga tempat penulis bekerja dalam naskah yang telah diterima untuk diterbitkan.
4. Abstrak ketik satu spasi, tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak memuat tujuan penelitian, isu, permasalahan, sampel dan metode penelitian, serta hasil dan simpulan (jika memungkinkan).

5. Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta rumusan hipotesis (jika ada). Uraian pendahuluan maksimum 10% total halaman.
6. Untuk penelitian kuantitatif,
 - a. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis memuat paling tidak satu buah teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Hipotesis dikembangkan menggunakan asumsi dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Telah literatur maksimum 40 % total halaman.
 - b. Metodologi Penelitian meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan, metoda yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Uraian bahan dan metoda maksimum 20 % total halaman.
7. Untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan metodologi kualitatif.
8. Hasil dan Pembahasan merupakan uraian obyektif dari-hasil penelitian dan pembahasan dilakukan untuk memperkaya makna hasil penelitian. Uraian hasil dan pembahasan minimum 25 % total halaman.
9. Simpulan yang merupakan rumusan dari hasil-hasil penelitian. Harus ada sajian dalam satu kalimat inti yang menjadi simpulan utama. Simpulan maksimum 10% dari keseluruhan lembar artikel.
10. Referensi (Daftar Pustaka) ditulis berurutan berdasarkan alphabetical, disusun menggunakan suku kata terakhir dari nama penulisnya, atau institusi jika dikeluarkan oleh organisasi.
 - a. Buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku, penyunting (jika ada), nama penerbit, dan kota penerbitan.
 - b. Artikel dalam buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, judul buku, nama penyunting, kota penerbitan, nama penerbit, dan halaman.
 - c. Terbitan berkala: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, judul terbitan (bila disingkat, sebaiknya menggunakan singkatan yang baku), volume, nomor, dan halaman.
 - d. Artikel dalam internet: nama penulis, judul, dan situsnya.
 - e. Tabel diberi nomor dan judul dilengkapi dengan sumber data yang ditulis dibawah badan tabel, diikuti tempat dan waktu pengambilan data.
 - f. Ilustrasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, peta, dan foto diberi nomor dan judul.
11. Setiap referensi yang digunakan di dalam naskah artikel menggunakan petunjuk yang dirujuk pada The Indonesian Journal of Accounting Research, sebagai berikut:
 - A. Kutipan dalam tubuh naskah paper harus disesuaikan dengan contoh berikut:
 - I. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981).
 - II. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon, 1991).
 - III. Satu sumber kutipan dengan lebih dari satu penulis (Hotstede et al., 1990).
 - IV. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk, 1990; Mia, 1988).
 - V. Dua sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981, 1983).
 - VI. Dua sumber kutipan dengan satu penulis diterbitkan pada tahun yang sama (Brownell, 1982a, 1982b).
 - VII. Sumber kutipan dari lembaga harus dinyatakan dengan menggunakan akronim institusi (FASB, 1994)
 - B. Setiap artikel harus menulis referensi menggunakan panduan berikut:
 - I. Referensi harus tercantum dalam urutan abjad dari nama belakang penulis atau nama lembaga.

- II. Referensi harus dinyatakan dengan urutan sebagai berikut: penulis (s) nama, tahun publikasi, judul kertas atau buku teks, nama jurnal atau penerbit dan nomor halaman. Contoh:
- a) Amerika Akuntansi Association, Komite Konsep dan Standar Laporan Keuangan Eksternal. 1977. Pernyataan tentang Teori Akuntansi dan Teori Penerimaan. Sarasota, FL: AAA.
 - b) Demski, J. S., dan D. E. M. Sappington. 1989. Struktur hirarkis dan akuntansi pertanggungjawaban, *Jurnal Akuntansi Penelitian* 27 (Spring): 40-58.
 - c) Dye, R. B., dan R. Magee. 1989. Biaya Kontijensi untuk perusahaan audit. Kertas kerja, Northwestern University, Evanston, IL.
 - d) Indriantoro, N. 1993. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Locus of Control dan Dimensi Budaya sebagai Moderating Variabel. Ph.D. Disertasi. University of Kentucky, Lexington.
 - e) Naim, A. 1997. Analisis Penggunaan Akuntansi Biaya Produk Dalam Keputusan Harga oligopolistik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12 (3): 43-50.
 - f) Porcano, T. M. 1984a. Keadilan distributif dan Kebijakan Pajak. *Akuntansi Ulasan* 59 (4): 619-636.
 - g) ----- . 1984b. Pengaruh Persepsi Kebijakan Pajak Niat Investasi Perusahaan. *The Journal of American Association Perpajakan* 6 (Fall): 7-19.
 - h) Pyndyk, R. S. dan D. L. Rubinfeld. 1987. Model ekonometrik & Forecasts Ekonomi, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc.
12. Author(s) harus melampirkan CV, alamat email, alamat korespondensi dan pernyataan yang menyatakan pasal tersebut tidak sedang disampaikan kepada atau diterbitkan oleh jurnal lain dalam email tersebut dan /atau pos.

**Strategi Meningkatkan Kepercayaan Publik Di Indonesia:
Peran *Good Governance* dan *E-Government***

**Soewito¹,
Haninun²,
Nurdiawansyah³,
Khairudin⁴,
Luke Suciwati Amna⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Bandar Lampung_Indonesia

E-Mail:

soewito@ubl.ac.id
haninun@ubl.ac.id
nurdiawansyah@ubl.ac.id
khairudin@ubl.ac.id
luke.suciwati.amna@ubl.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keterkaitan *good governance* dan *e-government* dengan kepercayaan publik pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan 2015-2018. *Good governance* diukur menggunakan indeks *governance* melalui metode *Principle Component Analysis*, *e-government* diukur menggunakan pemeringkatan *e-government* Indonesia, dan kepercayaan publik diukur menggunakan penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik. Data penelitian bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Hasil penelitian menggunakan regresi data panel menunjukkan bahwa *good governance* dan *e-government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik. Riset ini memiliki implikasi bahwa keberlanjutan dan peningkatan kualitas *good governance* dan *e-government* pada organisasi pemerintah daerah harus terus diupayakan melalui kerjasama semua *stakeholder* dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah.

Kata Kunci: *good governance; e-government; kepercayaan publik*

PENDAHULUAN

Kepercayaan publik merupakan respon positif masyarakat terhadap program kerja dan capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama kurun waktu tertentu. Kepercayaan publik (*publik trust*) sangat penting bagi pemerintah, karena dapat menurunkan biaya transaksi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik (Fukuyama, 1995); bahan pertimbangan untuk merumuskan setiap kebijakan (Blind, 2007); membangun hubungan kemitraan dengan rakyat (El Junusi, 2012); menjamin kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Walle & Six, 2014); melegitimasi dan keberlanjutan sistem politik (Yousaf et al., 2016) sehingga pemerintahan dapat terus melaksanakan kegiatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan dengan kondusif. Kepercayaan publik timbul sebagai hasil dari kapasitas manajemen publik dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemerintahan (Kim, 2010), sedangkan menurut Sahuri (2013) kepercayaan publik tumbuh dan berkembang karena didukung oleh kualitas organisasi yang baik.

Fakta yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa menurut OECD (*Organization for Co-operation and Economic Development*) kepercayaan publik kepada pemerintah tergolong sangat tinggi dan menempatkan Indonesia dalam posisi terbaik di antara anggota OECD lainnya (www.revolusimental.go.id, 2019), namun disisi lain indeks *good governance* Indonesia masih tergolong rendah dengan skor 47 dari skor maksimal 100 dan menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 83% implementasi *e-government* pemerintah daerah di Indonesia masih rendah (www.mediaindonesia.com, 2019).

Penelitian tentang *good governance*, *e-government* dan kepercayaan publik telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang masih tidak konsisten. Hasil penelitian (Cheung, 2013; Salminen & Ikola-Norrbacka, 2010) menemukan bahwa *good governance* memiliki hubungan yang positif pada publik trust di Finlandia dan Hongkong. Temuan yang berbeda ditunjukkan oleh (Widjajanti & Sugiyanto, 2015; Widodo et al., 2020) menemukan bahwa *good governance* tidak berpengaruh pada kepercayaan masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian (Gracia & Ariño, 2015; Jalali & Khorasani, 2012; Parent et al., 2005) menemukan bahwa *e-government* memiliki hubungan yang positif pada publik trust di Spanyol, Theheran dan Kanada. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh (Grimmelikhuijsen et al., 2013; Morgeson et al., 2011) dengan hasil temuan *e-government* dan publik trust tidak memiliki hubungan yang signifikan di Amerika, Belanda dan Korea Selatan, sedangkan (Goldfinch et al., 2009) menemukan *e-government* memiliki efek negative pada kepercayaan publik di Australia dan New Zealand.

Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada pengembangan model dan pengukuran variabel. Penelitian ini menjadikan variabel *good governance*, *e-government* dan kepercayaan publik dalam satu model. Hal ini dimaksudkan karena peningkatan kepercayaan publik oleh pemerintah harus dilakukan secara bersinergi, baik melalui peningkatan kualitas *good governance* dan juga *e-government*.

Adapun kebaruan dari sisi pengukuran, yakni penelitian ini menggunakan penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik untuk mengukur kepercayaan publik, karena pada dasarnya pelayanan publik adalah kepercayaan publik (OECD, 2000) dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 mengamanatkan kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD dan BHMN. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dapat berjalan sesuai harapan publik.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan teori *stakeholder* untuk menjelaskan hubungan *good governance*, *e-government* dan kepercayaan publik. Istilah *stakeholders* pada awalnya diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* (SRI), dimana inti pemikirannya mengarah pada keberadaan suatu organisasi yang sangat dipengaruhi oleh dukungan kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan organisasi tersebut (Freeman, 1984). Gray et al., (1997) menyatakan *stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan/organisasi yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan/organisasi. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan/organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (Ghozali & Chariri, 2007).

Pemerintah daerah sebagai suatu organisasi harus dapat memberikan manfaat kepada semua *stakeholder*. Untuk mewujudkan manfaat kepada semua *stakeholder*, maka pemerintah harus mendapatkan dukungan publik dalam bentuk kepercayaan publik. Dukungan rakyat dalam bentuk kepercayaan publik sangat penting bagi organisasi pemerintah, karena kepercayaan publik dapat membangun hubungan kemitraan dengan rakyat (El Junusi, 2012); menjamin kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Walle & Six, 2014); melegitimasi dan keberlanjutan sistem politik (Yousaf et al., 2016) sehingga pemerintahan dapat terus melaksanakan kegiatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan dengan kondusif.

Untuk mendapatkan kepercayaan publik, maka organisasi pemerintah harus berkualitas dan untuk itu pemerintah harus menerapkan *good governance* (KNKG, 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi) dan menerapkan *e-government* (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008; Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*). Hal ini diperlukan, mengingat kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh integritas, kompetensi, konsistensi dan loyalitas dari organisasi (Nyhan, 2000) yang akan terwujud dengan menerapkan *good governance* dan *e-government*.

Good Governance dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik adalah kepercayaan warga terhadap negara dan pemerintah, termasuk di dalamnya institusi, kebijakan, dan pejabatnya (Mayer et al., 1995). Kepercayaan publik bukan suatu hal yang datang dengan sendirinya namun sesuatu yang bersifat sangat dinamis dan harus dikelola (Dwiyanto, 2011). Kepercayaan warga akan muncul ketika pemerintah atau layanan publik yang diterima masyarakat mencerminkan kinerja yang kompeten, dapat diandalkan, jujur, dan terpenuhinya kebutuhan mereka (Park & Blenkinsopp, 2011). Kepercayaan publik sangat penting bagi pemerintah, karena dapat menurunkan biaya transaksi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik (Fukuyama, 1995); bahan pertimbangan untuk merumuskan setiap kebijakan (Blind, 2007); membangun hubungan kemitraan dengan rakyat (El Junusi, 2012); menjamin kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Walle & Six, 2014); melegitimasi dan keberlanjutan sistem politik (Yousaf et al., 2016); untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan untuk memanfaatkan sumber-sumber untuk mencapai sasaran-sasaran sosial (Kathi & Cooper, 2005); dapat meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen, sehingga akan mendorong kegiatan ekonomi utama (OECD, 2020); menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun social dalam aktivitas pemerintah (Z. Ibrahim et al., 2020).

Kepercayaan publik dapat ditingkatkan dengan implementasi *good governance* melalui prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan (Cheung, 2013; El Junusi, 2012; Salminen & Ikola-Norrbacka, 2010) sehingga dengan implementasi *good governance* penyelenggaraan pemerintahan berjalan profesional yang dapat melahirkan iklim bisnis yang sehat, meningkatnya daya saing, turunnnya praktek korupsi dan suap, meningkatkan kesejahteraan (KNKG, 2010) yang tentunya akan menumbuhkan kepercayaan kepada pemerintah, mengingat kepercayaan warga akan muncul ketika pemerintah menunjukkan kinerja yang kompeten, dapat diandalkan, jujur, dan terpenuhinya kebutuhan mereka (Park & Blenkinsopp, 2011).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya (Jameel et al., 2019) menemukan bahwa *good governance* memiliki hubungan positif pada kepercayaan publik di Pakistan. Yousaf et al., (2016) menemukan bahwa *good governance* berpengaruh positif pada peningkatan kepercayaan publik di Pakistan. Nasim et al., (2014) menemukan bahwa transparansi, pengelolaan zakat dan sikap pengelola berpengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki di Kota Bandung. Nurrizkiana et al., (2017) berhasil menemukan pengaruh positif dan signifikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan stakeholder Kabupaten Lombok. Namun Widjajanti & Sugiyanto (2015) menemukan *good university governace* secara langsung tidak berpengaruh terhadap *trust* di Fakultas Ekonomi Universitas Semarang-Indonesia. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1. *Good Governance* berpengaruh positif pada kepercayaan publik

***E-government* dan Kepercayaan Publik**

E-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003). Penyelenggaraan *e-government* oleh pemerintah merupakan bentuk pembaharuan tata sistem yang penerapannya mengacu kepada pentahapan pengembangan *e-government* secara nasional dengan menyesuaikan kondisi masing-masing organisasi yang sekaligus sebagai jawaban tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi cepat, lengkap, akurat dan terintegrasi.

Implementasi *e-government* mengharuskan setiap organisasi pemerintah untuk mempublikasikan setiap informasi pada sistem untuk dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga akan meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum serta pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh (Raharjo, 2001). Selain itu, menurut Indrajit (2002) implementasi *e-government* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan peluang bagi pemerintah mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru; meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia (Majeed & Malik, 2016); memicu peningkatan pendapatan pemerintah (Robbins et al., 2015); mereduksi praktik korupsi (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018b); meningkatkan kepercayaan publik (Tolbert & Mossberger, 2006).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Gracia & Casaló Ariño (2015) berhasil menemukan bahwa *e-government* memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepercayaan publik di Spanyol. Jalali & Khorasani (2012) menemukan *e-government* memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepercayaan publik di Theheran. Parent et al., (2005) menemukan bahwa *e-government* memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepercayaan publik di Kanada. Nulhusna et al., (2017) menemukan bahwa kualitas *e-government* memiliki hubungan yang positif dan signifikan pada kepercayaan publik di Indonesia. Namun Morgeson et al., (2011) menemukan bahwa *e-government* tidak berkorelasi pada peningkatan kepercayaan publik di Amerika Serikat. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Hipotesis 2. *E-government* berpengaruh positif pada kepercayaan publik

METODE PENELITIAN

Penelitian di lakukan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan 2015-2018, dimana data-data penelitian bersumber dari Kemkominfo-RI, Ombudsman Republik Indonesia dan masing-masing pemerintah provinsi. Penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria pemerintah provinsi yang telah memiliki nilai peneringkatan *e-government* Indonesia, nilai tingkat kepatuhan standar pelayanan publik, nilai indeks demokrasi, nilai pengungkapan, nilai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, nilai tingkat penyelesaian tindak pidana oleh aparat penegak hukum dan opini audit selama periode pengamatan.

Variabel	Operasional Variabel	Pengukuran Variabel
Kepercayaan Publik	kepercayaan warga terhadap negara dan pemerintah, termasuk di dalamnya institusi, kebijakan, dan pejabatnya.	diukur menggunakan penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia (Undang-Undang No. 37 Tahun 2008).
Good Governance	rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2010)	diukur menggunakan <i>governance index</i> yang diolah dengan metode <i>Principal Component Analysis</i> (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018; Zou et al., 2006). Prinsip Demokrasi diukur menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (Ibrahim, 2017; Rauf et al., 2014). Prinsip Transparansi diukur dengan dengan membandingkan antara pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pengungkapan wajib menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (Djasuli et al., 2013; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018; Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011). Prinsip Akuntabilitas diukur melalui tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun sebelumnya ditambah dengan yang tidak dapat ditindak lanjuti dibagi dengan total rekomendasi (Liu & Lin, 2012; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018). Prinsip Budaya Hukum diukur dengan tingkat penyelesaian tindak pidana oleh aparat penegak hukum (Arliman, 2019; Soekanto, 2019). Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diukur dengan opini audit yang diperoleh (Heriningsih & Marita, 2013; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018).
<i>E-government</i>	<i>E-government</i> merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003)	diukur dengan pemeringkatan <i>e-government</i> Indonesia yang bersumber dari Kemkominfo-RI (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018).

Alat analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian meliputi: statistik deskriptif, uji pemilihan model estimasi, uji kelayakan model (Uji statistik F), uji hipotesis (uji statistik t) dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil *purposive sampling* menunjukkan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 136 yang terdiri dari 34 provinsi dengan periode pengamatan selama 4 (empat) tahun, yakni 2015 sampai dengan 2018, dimana pengujian statistik menjelaskan bahwa nilai tertinggi indeks *good governance* selama periode pengamatan adalah 77,81 yang diraih Provinsi Bali, nilai tertinggi untuk *e-government* sebesar 3.85 diraih Provinsi Jawa Tengah dan nilai tertinggi kepercayaan publik sebesar 99,76 diraih Provinsi Jawa Timur. Nilai terendah indeks *good governance* sebesar 43,83 diraih oleh Provinsi Maluku Utara, nilai terendah *e-government* sebesar 1,54 diraih Provinsi Bengkulu dan nilai terendah kepercayaan publik sebesar 10 ditempati Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Papua Barat. Nilai mean indeks *good governance* sebesar 62,59 dengan predikat “cendrung baik”, nilai mean *e-government* sebesar 2.31 dengan predikat “kurang” dan nilai mean kepercayaan publik sebesar 67.93 dengan kriteria “sedang” (lihat tabel 1). Masih belum baiknya pelaksanaan *good governance*, *e-government* dan kepercayaan publik pada pemerintah provinsi di Indonesia disebabkan karena adanya krisis multidimensi yang meliputi krisis moral, krisis hukum, krisis kepercayaan, dan krisis politik (Djuaeni, 2015); keterbatasan SDM sebagai tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika, keterbatasan anggaran, belum terintegrasinya data antar instansi pemerintah serta masih minimnya tingkat keamanan informasi dalam penerapan *e-government* (Dirjen Aplikasi Informatika-Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2014); masih tingginya praktek korupsi dan masih belum baiknya pelayan publik yang diterima masyarakat.

Tabel 1: Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Stdr Deviasi
<i>Good governance</i>	136	40.66	77.81	62.64	7.14
<i>E-government</i>	136	56.75	80.47	69.17	4.14
Kepercayaan Publik	136	0.04	11661.82	129.07	95.86
Valid N (listwise)	136				

Sumber : Data Diolah, 2020

Penelitian ini telah melakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil semua lulus uji asumsi klasik. Selain itu, penelitian ini juga telah melakukan uji chow, uji hausman dan uji *lagrange multiplier* dengan hasil bahwa model *fixed effect* merupakan model regresi yang paling tepat digunakan, sehingga hasil pengujian statistik tersaji seperti tabel berikut:

Tabel 2: Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob
C	14.04136	0.760568	0.0483
GG	0.809209	3.055568	0.0021
EG	14.89137	4.475926	0.0000
Adjusted R-squared		0.288683	
Prob F-statistic		0.000054	

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan model *random effect* dapat dijelaskan bahwa seluruh hipotesis penelitian yang diajukan terbukti dapat diterima/terdukung. Nilai probabilitas t_statistik variabel *good governance* (GG) sebesar 0.0021 atau ($0.0021 < 0,005$) dan nilai koefisien sebesar 0.809209 yang berarti bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik, sehingga hipotesis H₁ diterima/terdukung. Selanjutnya nilai probabilitas t_statistik variabel *e-government* (EG) sebesar 0.0000 atau ($0.0000 < 0,005$) dan nilai koefisien sebesar 14.89137. yang berarti bahwa bahwa *e-government* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik, sehingga hipotesis H₂ diterima/terdukung.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* yang baik pada organisasi pemerintah sangat diyakini memberikan kontribusi strategis dalam (1) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) menciptakan iklim bisnis yang sehat, (3) meningkatkan kemampuan daya saing, serta (4) sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi dan suap (KNKG, 2010). Pareke (2009) manfaat yang diperoleh dalam penerapan *good governance* (1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas; (2) meningkatkan kepercayaan publik; (3) menjaga kelangsungan pemerintahan daerah; dan (4) dapat mengukur target kinerja pemerintahan daerah. Hasil temuan ini mendukung beberapa hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya (Jameel et al., 2019; Nasim & Romdhon, 2014; Nurrizkiana et al., 2017; Yousaf et al., 2016) yang menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh positif pada peningkatan kepercayaan publik.

Tumbuh dan berkembangnya kepercayaan publik sangat penting bagi organisasi pemerintah untuk membangun hubungan kemitraan dengan rakyat (El Junusi, 2012); menjamin kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Walle & Six, 2014); melegitimasi dan keberlanjutan sistem politik (Yousaf et al., 2016). Organisasi pemerintah harus memiliki perangkat sistem informasi yang canggih dan terintegrasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif. Kualitas pelayanan publik yang semakin baik dapat menumbuhkembangkan kepercayaan publik. Hasil temuan ini mendukung hasil riset yang dilakukan oleh (Gracia & Ariño, 2015; Jalali & Khorasani, 2012; Parent et al., 2005) yang menyatakan bahwa e-government memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yakni Pertama, kualitas *good governance*, kualitas *e-government* dan kepercayaan publik pemerintah provinsi di Indonesia masih belum baik. Kedua, *good governance* dan *e-government* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teori *stakeholder* terbukti mampu untuk menjelaskan pengaruh *good governance* dan *e-government* terhadap kepercayaan publik, sehingga keberadaan dan keberlanjutan *good governance* dan *e-government* pada organisasi pemerintah (pusat dan daerah) harus terus ditingkatkan kualitasnya untuk mewujudkan peningkatan kepercayaan publik sebagai salah satu modal penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum yang baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Blind, P. K. (2007). *Building Trust in Government in the Twenty-First Century: Review of Literature and Emerging Issues*.
- Cheung, A. B. L. (2013). Public Governance Reform in Hong Kong: Rebuilding Trust and Governability. *International Journal of Public Sector Management*, 26(5), 421–436. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-05-2013-0070>
- Djasuli, M., Putri, G. A., & Harwida, G. A. (2013). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang baik, Tingkat Hutang, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Pamator*, 6(1), 83–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v6i1.3091>
- Djuaeni, A. (2015). Tantangan Penerapan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Inspirasi*, 6(2), 32–36. <https://doi.org/10.35880/.v6i2.36>
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Gramedia. Jakarta.
- El Junusi, R. (2012). Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 87. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.48>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/id/academic/subjects/management/business-ethics/strategic-management-stakeholder-approach>
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press. New York.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi* (3rd Edition.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. <https://digilib.undip.ac.id/v2/2012/10/04/teori-akuntansi/>
- Goldfinch, S., Gauld, R., & Herbison, P. (2009). The Participation Divide? Political Participation, Trust in Government, and E-government in Australia and New Zealand. *Australian Journal of Public Administration*, 68(3), 333–350. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2009.00643.x>
- Gracia, D. B., & Casaló Ariño, L. V. (2015). Rebuilding Public Trust in Government Administrations through E-Government Actions. *Revista Española de Investigación de Marketing ESIC*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.reimke.2014.07.001>
- Gray, R., Dey, C., Owen, D., Evans, R., & Zadek, S. (1997). Struggling with the Praxis of Social Accounting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 10(3), 325–364. <https://doi.org/10.1108/09513579710178106>

- Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2013). The Effect of Transparency on Trust in Government: A Cross-National Comparative Experiment. *Public Administration Review*, 73(4), 575–586. <https://doi.org/10.1111/puar.12047>
- Heriningsih, S., & Marita, M. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 67–78. <http://eprints.upnyk.ac.id/7394/>
- Ibrahim, I. (2017). Menakar Kedalaman Pengukuran Demokrasi Model Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Beberapa Catatan Substantif dari Kepulauan Bangka Belitung. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 30(2), 133. <https://doi.org/10.20473/mkp.V30I22017.133-149>
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan, S. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(2), 80 – 93. <https://doi.org/10.2568/yum.v3i2.777>
- Indrajit, R. E. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Andi. Yogyakarta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=177594>
- Jalali, F., & Khorasani, F. (2012). The Relationship between E-Government and the Public Trust among the Citizens in District 5, Tehran. *Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology*, 4(23), 5261–5267.
- Jameel, A., Asif, M., & Hussain, A. (2019). Good Governance and Public Trust: Assessing the Mediating Effect of E-Government in Pakistan. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 17(2), 299–320. [https://doi.org/10.4335/17.2.299-320\(2019\)](https://doi.org/10.4335/17.2.299-320(2019))
- Kathi, P. C., & Cooper, T. L. (2005). Democratizing the Administrative State: Connecting Neighborhood Councils and City Agencies. *Public Administration Review*, 65(5), 559–567. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00483.x>
- Kim, P. S. (2010). Building Trust by Improving Governance: Searching for a Feasible Way for Developing Countries. *Public Administration Quarterly*, 34(3), 271–299.
- KNKG. (2010). *Good Public Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance. www.knkg-indonesia.org
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Majeed, M. T., & Malik, A. (2016). E-government, Financial Development and Economic Growth. *Pakistan Journal of Applied Economics*, 26(2), 107 – 128. <https://doaj.org/article/1be533329fc744c6a7403c44400ecc66>

- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080335>
- Morgeson, F. V., VanAmburg, D., & Mithas, S. (2011). Misplaced Trust? Exploring the Structure of the E-Government-Citizen Trust Relationship. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(2), 257–283. <https://doi.org/10.1093/jopart/muq006>
- Nasim, A., Rizqi, M., & Romdhon, S. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 2(3), 550–561.
- Nulhusna, R., Sandhyaduhita, P. I., Hidayanto, A. N., & Phusavat, K. (2017). The Relation of E-Government Quality on Public Trust and Its Impact on Public Participation. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 11(3), 393–418. <https://doi.org/10.1108/TG-01-2017-0004>
- Nurriksiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 28–47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Nyhan, R. C. (2000). Changing the Paradigm. *The American Review of Public Administration*, 30(1), 87–109. <https://doi.org/10.1177/02750740022064560>
- OECD. (2000). *Annual Report 2000*. OECD.Org.
- Pareke, J. T. (2009). *Good Government Governance: Manfaat dan Permasalahannya*. <http://hisabdunia.blogspot.com/2009/04/good-government-governance-manfaat-dan.html>
- Parent, M., Vandebek, C. A., & Gemino, A. C. (2005). Building Citizen Trust through E-Government. *Government Information Quarterly*, 22(4), 720–736. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.10.001>
- Park, H., & Blenkinsopp, J. (2011). The Roles of Transparency and Trust in the Relationship between Corruption and Citizen Satisfaction. *International Review of Administrative Sciences*, 77(2), 254–274. <https://doi.org/10.1177/0020852311399230>
- Raharjo, B. (2001). Membangun E-Government. *Seminar Nasional Jaringan Komputer II oleh Technic Study Club, STMIK Dipanegara Makassar, 19 Mei 2001*. <http://www.geocities.com/seminartsc>
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola dan E-Government terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431–450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Rauf, M., Hidayat, S., Gisamar, A. M., & Muli, S. M. (2014). *Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Berdemokrasi: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2013*. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Badan Pusat Statistik. <https://catalogue.nla.gov.au/>

- Robbins, G., Mulligan, E., & Keenan, F. (2015). E-Government in the Irish Revenue: The Revenue On-Line Service (ROS): A Success Story? *Financial Accountability & Management*, 31(4), 363–394. <https://doi.org/10.1111/faam.12061>
- Sahuri, C. (2013). Membangun Kepercayaan Publik melalui Pelayanan Publik yang Berkualitas. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 9(01), 52 – 64. <https://doi.org/10.46730/jiana.v9i01.1054>
- Salminen, A., & Ikola-Norrbacka, R. (2010). Trust, Good Governance and Unethical Actions in Finnish Public Administration. *International Journal of Public Sector Management*, 23(7), 647–668. <https://doi.org/10.1108/09513551011078905>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada. <http://www.rajagrafindo.co.id/>
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(1), 30–42. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/4345>
- Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2006). The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government. *Public Administration Review*, 66(3), 354–369. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00594.x>
- Walle, S. Van De, & Six, F. (2014). Trust and Distrust as Distinct Concepts: Why Studying Distrust in Institutions is Important. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 16(2), 158–174. <https://doi.org/10.1080/13876988.2013.785146>
- Widjajanti, K., & Sugiyanto, E. K. (2015). Good University Governance untuk Meningkatkan Excellent Service dan Kepercayaan Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 69–81. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.504>
- Widodo, D. S., Silitonga, E. S., & Ali, H. (2020). The Influence of good Governance, Culture, and Performance in Increasing Public Satisfaction and Implication to Public Trust: Study in Indonesian government. *Journal of Talent Development & Excellence*, 12(2), 843–854.
- Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. (2016). Exploring the Impact of Good Governance on Citizens' Trust in Pakistan. *Government Information Quarterly*, 33(1), 200–209. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.06.001>
- Zou, H., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2006). Sparse Principal Component Analysis. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 15(2), 265–286. <https://doi.org/10.1198/106186006X113430>